



CATATAN RAPAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 9 (Sembilan)
Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia.
Hari, Tanggal	: Selasa, 3 September 2024
Pukul	: 15.30 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka.
Pimpinan Rapat	: Mohamad Hekal, M.B.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E,M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Menerima Audiensi dari Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia.
Hadir	: 1. 3 Orang dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Ketua Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia, Sdr. Satria Gentur Pinandita Beserta Rombongan.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia pada pukul 16.46 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 3 September 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN

Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia terkait dengan dinamika yang terjadi pada Industri Mononatrium Glutamat (MNG) di Indonesia yang tertekan oleh beberapa situasi di Indonesia. Dalam Audiensi tersebut terdapat beberapa catatan dan aspirasi yang disampaikan oleh Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia antara lain:

1. Volume ekspor Tetes (Lartas) agar dapat dikendalikan dan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri.
2. Impor MNG yang terutama dari China agar dikendalikan oleh pemerintah.
3. Mewajibkan SNI dan penerapan larangan dan pembatasan (Lartas) untuk impor MNG.
4. Pemberian fasilitas harga gas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US\$ 6 per MMBTU, untuk menekan biaya produksi sehingga bisa bersaing dengan MNG Impor.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menjadwalkan pertemuan/rapat dengan Kementerian dan BUMN terkait, guna mencari solusi dalam penyelesaian masalah tersebut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.28 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

**MOHAMAD HEKAL, M.B.A
A-103**